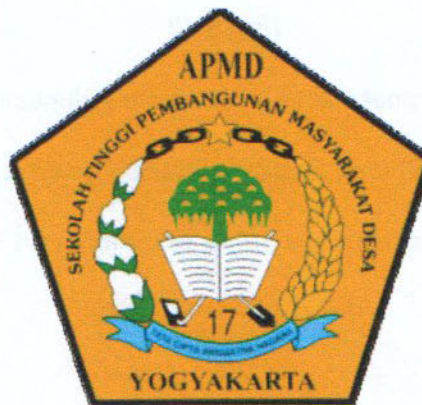


SKRIPSI
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DESA KERTEN, KECAMATAN GANTIWARNO,
KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH



Disusun Oleh:

LORENTHIO GRATHIANO
17520150

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2023



**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DESA KERTEN KECAMATAN GANTIWARNO
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

**LORENTHIO GRATHIANO
17520150**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Progam Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 03 Februari 2023

Pukul : 12.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. Utami Sulistiana, S.P., M.P.
Ketua Penguji/Pembimbing

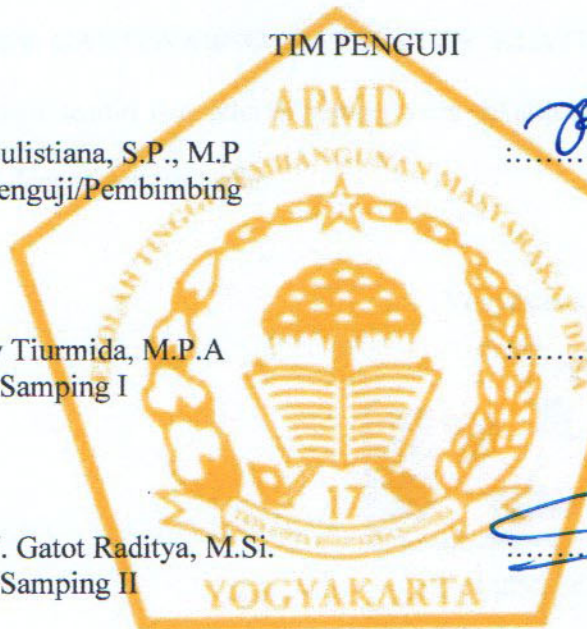


2. Ir. Nelly Tiurmida, M.P.A
Penguji Samping I



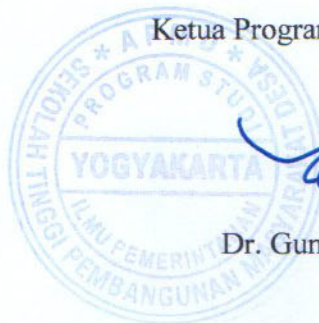
3. Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.
Penguji Samping II





Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan





Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lorenthio Grathiano

Nim : 17520150

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA KERTEN KECAMATAN GANTIWARNOW KABUPATEN KLATEN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, Januari 2023

Peneliti



Lorenthio Grathiano
17520150

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta Perantaraan Bunda Maria atas berkat, perlindungan dan tuntunan-Nya kepada peneliti sehingga mampu mengerjakan tugas akhir ini. Peneliti menyampaikan apresiasi serta rasa syukur kepada pihak yang senantiasa membantu dan menemani:

1. Bapak Godefridus Lusius Taloni dan Ibu Jhosephina Ariany atas doa, penguatan, dorongan dan semangat yang tiada henti yang diberikan kepada saya sepanjang waktu terkhusus *supports* yang sangat luar biasa selama pengerjaan Skripsi ini.
2. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P. yang menjadi Pembimbing selama peneliti melakukan tugas akhir.
3. Terima kasih Bapak Agus Egot dan Ibu Elisabeth Damus yang selalu mendoakan saya.
4. Terima kasih yang sedalam-sedalamnya kepada istri saya tercinta Emilia G. Egot yang telah mendukung saya tiada henti dalam proses penyusunan skripsi ini dan juga Putra saya terkasih Avellario Maynarth Luciano yang menjadi penghibur bagi saya selama ini.
5. Terima kasih kepada Kakak saya Ignasius Nikolaus, dan kedua adik saya Marselino T. Fernando, Mariano, kakak Astrid, kakak Hery Mbetuk, kakak Jos kakak Chen Lehot, kakak Ancik, kakak Irfando, Kakak Zero yang senantiasa mendukung.
6. Terima kasih kepada adik-adik saya Pio, Jho, Tian, Vagen, Rhoy, Nando, Maristin, Ergin, Veranda, Trin, Juan, Pedro, Priska dan Ayu yang senantiasa menemani penulisan tugas akhir.
7. Terima kasih rekarekan Yoja, Cimi, Osdin, Indra, Fais, Dineri, Nano, Inok, Minggu, Ocin yang tidak berhenti mengisi keceriaan saat menuliskan tugas akhir.

MOTTO

“Jadilah diri sendiri karena tidak ada orang lain yang seperti Anda, dan karena cinta Anda kepada-Nya tidak pernah goyah.”

“Meskipun kita tentu saja bisa berkecil hati dengan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, kita tidak boleh membiarkan hal tersebut mengurangi optimisme kita akan masa depan. Bagaimana kita dapat memutuskan opsi mana yang lebih unggul?”

“Genggamlah dunia Sebelum Dunia menggenggam-Mu”

“Jangan khawatir; saya di sini untuk membantu. Jangan khawatir, Aku mendukungmu. Aku akan menguatkanmu dan bahkan mengulurkan tangan-Ku untuk menuntunmu menuju kemenangan dengan tangan kanan-Ku yang kuat.”

KATA PENGANTAR

Syukur atas rezki dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, penulisan tugas akhir ”Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani” mampu diselesaikan. Tugas akhir menjadi kebutuhan untuk mendapatkan gelar S1 Ilmu Pemerintahan. Penulisan tugas akhir tidak mampu terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan segenap pihak, izinkan peneliti mengucapkan rasa terimakasih tersebut:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat Penulis belajar, berproses dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Suyadi S.Sos selaku Kepala Desa Kerten tempat penulis melakukan penelitian.

8. Bapak Muji Pamungkas dan Bapak Warso selaku Ketua Kelompok Tani Desa Kerten yang selalu membantu penulis mendapatkan informasi guna mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini.
9. Anggota Kelompok Tani “Makmur Widodo dan Bayem Panguripan” Desa Kerten yang bersedia memberikan informasi dan selalu menyemangati penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, Januari 2023

Peneliti

Lorenthio Grathiano

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
F. Literatur Riview	8
G. Kerangka Konseptual	20
1. Konsep Governmentality	20
2. Konsep Strategi	21
3. Konsep Pemerintah Desa	22
4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	27
H. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Unit Analisis	36
3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
4. Teknik Analisis Data.....	40
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	43
A. Sejarah Desa Kerten.....	43

B. Kondisi Geografis	44
C. Kondisi Demografis	47
1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	47
2. Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama	47
3. Jumlah Penduduk menurut Golongan Pendidikan	48
4. Jumlah Penduduk Masyarakat Tani	49
D. Keadaan Sosial dan Ekonomi	50
E. Sarana dan Prasarana	51
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kerten.....	52
G. Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Kerten	53
1. Kepala Desa	53
2. Badan Permusyawaratan Desa	53
3. Sekretaris/Carik.....	53
4. Kaur Keuangan	54
5. Kaur Umum dan Perencanaan	54
6. Kasi Kesejahteraan.....	55
7. Kasi pemerintahan	56
8. Kasi Pelayanan.....	56
9. Kepala Dusun.....	57
BAB III ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM	
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA KERTEN,	58
A. Pemungkinan.....	59
B. Penguatan	65
C. Perlindungan	69
D. Penyokongan.....	72
E. Pemeliharaan	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
PEDOMAN WAWANCARA	85
DOKUMENTASI	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informan.....	38
Tabel 2. 1 Luas wilayah menurut Penggunaannya.....	45
Tabel 2. 2 Batas Wilayah Desa Kerten	46
Tabel 2. 3 Kondisi Orbitasi Desa Kerten	46
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin	47
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Agama.....	47
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk masyarakat tani	49
Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana di Desa Kerten	51

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kerten	52
---	----

INTISARI

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan "pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan inti masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa." Melalui pemberdayaan diharapkan adanya peningkatan kemampuan seseorang, khususnya kelompok petani, agar dapat mandiri dan hidup sejahtera. Dalam kesehariannya, para petani di pedesaan sering kali mengalami masalah dan keterbatasan. Beberapa masalah tersebut adalah kurangnya pendidikan, keterampilan yang kurang baik, dan terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan pelatihan.

Memberdayakan masyarakat berarti memberi para anggotanya lebih banyak suara untuk menentukan bagaimana mereka menggunakan dan mengelola waktu, uang, tenaga, dan aset-aset lainnya. Pertumbuhan pertanian lokal dibantu oleh kelompok-kelompok seperti koperasi petani, yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar. Pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam memungkinkan daerah pedesaan untuk bangkit dari kemiskinan. Pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk secara efektif meningkatkan standar hidup petani. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merinci pendekatan yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Kerten untuk memperkuat organisasi petani di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Metode kualitatif eksploratif menjadi pilihan. Penelitian meneliti terkait Kepala Desa Kerten dan berbagai cara yang dilakukannya untuk memberikan legitimasi, kekuatan, perlindungan, bantuan, dan pemeliharaan kepada kelompok tani. Penelitian ini didasarkan pada wawancara dengan 10 orang, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, bendahara kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Dalam penelitian ini, cara pemilihan informan dilakukan secara sengaja. Untuk penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan catatan tertulis. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk melihat data penelitian.

Temuan menjelaskan rencana Pemerintah Desa untuk membangun kelompok tani di Desa Kerten dilakukan dengan memberikan pemberdayaan, penguatan, perlindungan, dukungan, dan pemeliharaan. Minimnya saluran irigasi di Desa Kerten membuat Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, dan juga membuat mereka kesulitan mendapatkan air saat musim kemarau. Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan sering melakukan pertemuan sebulan sekali untuk membahas masalah ini dan berunding dengan Pemerintah Desa Kerten.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pemberdayaan masyarakat, Kelompok Tani.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian menjadi bagian dari kekayaan alam yang dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masalah pertanian menjadi semakin rumit dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah desa. Karena sektor pertanian memiliki kemampuan untuk mendongkrak pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok tani, maka pengembangannya diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa, termasuk di bidang pengembangan ekonomi masyarakat. Maka, pemerintah desa perlu memastikan bahwa pembangunan di sektor pertanian dilakukan secara tepat dengan menggunakan segala potensi atau sumber daya yang ada.

Menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah subdivisi teritorial resmi negara. Desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan hukum adat. Mengetahui kekuatan dan peluang desa merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan pemerintah desa. Berdasarkan UUD RI Th 1945, desa diberikan hak asal usul dan hak adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta memperoleh kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan konstitusi Republik Indonesia dari waktu ke waktu, desa telah mengalami berbagai perubahan yang mengharuskan desa untuk dilindungi dan diberdayakan agar tetap kuat, berkembang, mandiri, dan demokratis; kualitas-kualitas ini sangat penting untuk menjalankan fungsi

pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Persyaratan hukum memastikan bahwa pemerintahan desa beroperasi sebagaimana mestinya hingga saat ini. Hal ini sangat jelas terlihat dalam pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa, dalam sistem Pemerintahan NKRI, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Penelitian ini mengambil perspektif pemerintah desa yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Otonomi desa diakui dalam UU No. 6 Tahun 2014. Fondasi ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat telah dibangun di desa-desa sebagai hasil dari inisiatif untuk meningkatkan masyarakat desa dan memberdayakan penduduknya. Oleh karena itu, implementasi UU Desa menjadikan tunduk pada pemerintah desa sebagai hal yang wajib dilakukan. Setelah bertahun-tahun berpartisipasi dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagai organisasi pemerintahan masyarakat, desa kini menjadi gabungan antara masyarakat dan pemerintahan lokal. Desa kini memainkan peran yang jauh lebih sentral dalam mengkoordinasikan dan mengelola urusan desa.

Sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia sangat penting, terutama dalam hal penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia. Selain itu, kemampuan pertanian untuk menyediakan bahan baku untuk industri dan tenaga kerja untuk kegiatan lainnya memiliki dampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan dan perlindungan sumber daya alam. Sejalan

dengan perkembangan ekonomi kota yang meledak-ledak. Semakin banyak potensi yang ada untuk memenuhi permintaan manusia yang tak terbatas. Khususnya di daerah pedesaan di mana lahan pertanian masih tersedia namun penduduknya tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan atau berada pada tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah, strategi ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk secara tidak langsung.

Kelompok tani menjadi kebutuhan masyarakat Desa Kerten. Permentan No. 82 Tahun 2013 terkait Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani menyebutkan kelompok tani ditumbuhkan dan dikembangkan dengan cara memberikan kekuatan kepada petani untuk mengubah pikiran mereka dalam rangka meningkatkan usaha tani dan kemampuan kelompok dalam menjalankan tugasnya. Karena kelompok tani terdiri dari para petani yang telah membentuk ikatan informal berdasarkan kepentingan bersama, sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan, keakraban, dan keharmonisan, serta para pemimpin yang mereka pilih untuk membantu mereka mencapai tujuan bersama, kelompok tani memainkan peran kelembagaan yang sangat besar di daerah pedesaan dalam mendukung dan mengimplementasikan berbagai program yang sedang dan akan diimplementasikan untuk mencapai pembangunan pertanian yang lebih baik. Kelompok tani memberi petani sesuatu untuk dilakukan dengan kehidupan mereka. Kelompok tani memberikan kesempatan untuk belajar, cara-cara untuk bekerja sama, dan tempat untuk membuat sesuatu (Anonim, 2012). Hermanto (2006) mengatakan bahwa organisasi petani memiliki tiga peran

penting selain peran utamanya, yaitu sebagai media sosial atau media penyuluhan, sebagai kendaraan untuk melakukan perubahan, dan sebagai tempat untuk menyimpan aspirasi. Jika peran tersebut dijalankan dengan baik, kelompok tani dapat menjadi kekuatan utama dalam membuat perubahan yang lebih besar. Dengan fungsi, peran, dan potensi yang dimiliki, kelompok tani memerlukan dukungan agar mampu mengembangkan dan menjalankan usaha taninya.

Untuk mendorong dan mengubah perilaku masyarakat, pemerintah desa telah menyusun strategi pemberdayaan yang berpusat pada kelompok tani. Rencana ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan potensi, dan melindungi kelompok tani. Petani adalah orang yang paling penting dalam situasi ini, dan mereka perlu memiliki lebih banyak kekuatan. Komunitas petani perlu dilibatkan sebanyak mungkin dalam pengembangan berbagai cara untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus ditujukan kepada (petani) untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan yang sudah mereka miliki. Hal ini harus diikuti dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan kesadaran masyarakat yang lebih baik, serta mengembangkan kebijakan, program, dan proyek yang sesuai dengan masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan besarnya jumlah penduduk desa Kerten,

pembangunan berbasis pertanian akan menjadi prioritas utama. Model yang akan dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat akan dimodifikasi dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Salah satu masyarakat di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, adalah Desa Kerten. Desa yang berpenduduk 197 jiwa ini memiliki potensi pertanian yang sangat tinggi, dan bertani merupakan sumber penghasilan utama mereka. Desa Kerten mempunyai 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok tani Bayem Panguripan yang diketuai oleh Bapak Muji Pamungkas, dengan wilayah pembagian Kadus 1 (satu) dan sebagian Kadus 3 (tiga). Kelompok Tani Makmur Widodo yang diketuai oleh Bapak Warso, dengan wilayah pembagian Kadus 2 (dua) dan sebagian Kadus 3 (tiga). Kelompok tani Bayem Panguripan memiliki anggota aktif 35 (tiga puluh lima) orang, sedangkan kelompok Tani Makmur Widodo memiliki anggota aktif 67 (enam puluh tujuh) orang. Desa Kerten memiliki luas lahan pertanian mencapai 64 Hektar. Setiap tahun petani di Desa Kerten memiliki 3 (tiga) kali masa panen yaitu padi, padi, dan tembakau kebetulan pada tahun ini curah hujan yang tinggi masyarakat tidak menanam tembakau karena masyarakat takut tanaman tembakau gagal panen disebabkan oleh banjir.

Pertumbuhan dan perjalanan kelompok tani Desa Kerten belum seperti yang diharapkan, menurut hasil pengamatan saya. Hal ini terlihat dari belum lengkapnya alat mesin pertanian yang saat ini digunakan, seperti alat pengering padi, alat pemanen padi, traktor, alat pembasmi hama, dan kios saprodi (penyedia bibit, pupuk, dan obat-obatan yang berkualitas). Selain itu,

infrastruktur yang ada kurang mendukung dan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Desa Kerten. Agar para petani nantinya dapat membuat bibit, pupuk, peralatan pertanian yang murah, serta mencari obat-obatan alternatif sebagai pengganti obat-obatan kimia yang selain harganya mahal juga berdampak buruk bagi hasil pertanian, maka perlu adanya peran Pemerintah Desa Kerten melalui strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya kepada Kelompok Tani Bayem Panguripan dan Makmur Widodo. Lahan pertanian di Desa Kerten yang cukup subur namun sangat membutuhkan air, sehingga perlu adanya saluran irigasi/pengairan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, penggunaan bibit unggul yang belum sepenuhnya dilakukan oleh para petani, dan penggunaan pupuk yang masih sangat minim merupakan contoh-contoh keputusan yang seharusnya dapat dianalisa dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa Kerten menjadi sebuah tindakan yang harus dilakukan.

Permasalahan tersebut mendorong inovasi peneliti serta membantu pemerintah desa dan masyarakat petani dalam menyelesaikan permasalahan dan memajukan pembangunan desa Desa Kerten melalui hasil pertanian dan mampu bermandaaaf bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah; **Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Bayem Panguripan dan Kelompok Tani Makmur Widodo di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.**

C. Fokus Penelitian

1. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Bayem Panguripan dan Kelompok Tani Makmur Widodo di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Bayem Panguripan dan Kelompok Tani Makmur Widodo di Desa Kerten.

D. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas:

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa studi ini akan menjadi sumber akademis yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai taktik tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan organisasi petani, serta menjadi referensi bagi para peneliti dan siapa pun yang tertarik dengan topik-topik ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Anggota masyarakat di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, dan sekitarnya dapat mengambil manfaat dari studi ini dengan mempelajari lebih lanjut tentang pendekatan pemerintah untuk memperkuat kelompok tani.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan menjadi stimulus untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pembangunan desa melalui pemberdayaan kelompok tani.
- c. Peneliti berharap dengan menggunakan teori pemerintahan dapat membantu dalam memajukan pemahaman ilmiah. Pengetahuan penulis akan bertambah jika dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana mendukung dan membentengi masyarakat.

F. Literatur Riview

Yang pertama adalah "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan" oleh L. I. Astuti, yang diterbitkan dalam sebuah jurnal. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu tugas negara adalah membantu warganya agar dapat hidup dengan baik. Hal ini dilakukan melalui program-program pembangunan. Pembangunan merupakan cara otoritas menaikkan perekonomian dengan menggali peluang pertanian masyarakat lokal.

Proses pemberdayaan yang telah dilakukan, terutama tahap penyadaran, kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat, mereka akan dapat

mengenali kemampuan diri serta mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan untuk menggunakannya. Hal ini akan membantu masyarakat mencapai potensi penuhnya untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, yang selama ini belum tercapai. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan masih terhambat oleh beberapa hal, antara lain, masalah dalam masyarakat, kurangnya penyuluhan pertanian, sumber daya alam yang kurang memadai, dan cuaca di Desa Asmorobangun. Mengakibatkan hasil kurang maksimal dari proses pemberdayaan.

Penelitian ingin menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam rangka membantu Desa Asmorobangun mengembangkan pertaniannya secara berkelanjutan. Penelitian dan diskusi ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat, yang merupakan kesamaan dari keduanya. Penelitian ini adalah tentang bagaimana pemerintah desa berencana untuk memberikan kekuatan kepada kelompok tani. Penelitian di atas adalah tentang bagaimana program pengembangan petani yang berkelanjutan memberikan kekuatan kepada masyarakat.

"Strategi Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Kelompok Tani di Desa Siawung," studi kasus kedua oleh Andi Tenri Nippi dan Andi Pananrangi M., dilakukan di Desa Siawung, Kecamatan, Kabupaten Baru. Organisasi petani mendapatkan lebih banyak kekuatan sehingga komunitas petani dapat berbuat lebih banyak serta mendapatkan peluang menjalankan dengan baik. Untuk mencapai tujuan ini, kita membutuhkan metode yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen mereka.

Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah mayoritas penduduk Desa Siawung adalah petani yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam memanfaatkan lingkungan mereka secara efektif. Para peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pemerintah desa di Desa Siawung, Kecamatan Barru, dan Kabupaten Barru memberikan suara kepada asosiasi petani setempat. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik yang dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Meskipun rencana tersebut tidak berhasil mencapai potensinya, hasil penelitian ini membuktikan upaya pemerintah desa Siawung.

Ketiga, jurnal Karbulah, Y., "Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Petani," mengatakan bahwa penelitian bertujuan melihat ketidakberdayaan ekonomi masyarakat petani, yang diperparah fakta bahwa pemerintah desa tidak melakukan cukup banyak hal untuk membantu dan bahwa pihak-pihak luar ikut terlibat. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan petani lebih banyak kekuatan sangat diperlukan, tanpa mengurangi pentingnya upaya lain untuk menyelesaikan masalah pertanian. Desa memainkan peran besar dalam mewujudkan lingkungan nyaman ditinggali karena pemerintah desa biasanya memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan warganya. Sebagian besar pemberdayaan masyarakat petani ini berasal dari program-program migrasi, baiknya pendidikan serta partisipasi masyarakat serta lembaga sosial.

Penelitian bertujuan mempelajari lebih lanjut tentang program pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat petani, memahami

prosedur pelaksanaan program ini, dan mempelajari lebih lanjut tentang hasil dari program ini. Data kualitatif dengan metode deskriptif digunakan dalam penelitian. Materi dikumpulkan dengan observasi dan wawancara, dan informasi direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan setelah dilakukan analisis informasi secara menyeluruh.

Menurut temuan penelitian, setiap kadus dan penyuluh petani menerima benih pepaya California langsung dari kepala desa sebagai bagian dari skema yang telah ditetapkan pemerintah desa. Guna mengefektifkan kegiatan pemberdayaan, pemerintah desa telah melakukan pendampingan kepada masyarakat, bekerja sama dengan para penyuluh pertanian, dan mengorganisir organisasi petani. Penelitian di atas lebih menekankan pada partisipasi otoritas setempat memberdayakan masyarakat petani, sedangkan penelitian ini lebih kepada rancangan otoritas setempat memberdayakan kelompok tani. Keduanya memiliki sedikit kesamaan dalam hal membahas pemberdayaan masyarakat petani.

Tesis Syukron Munjazi, "Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat," adalah yang keempat. Berdasarkan metode dan temuan penelitian kualitatif, dapat disimpulkan bahwa upaya BKM dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan Demangan melalui program pinjaman dana bergulir yang didanai oleh PNPM-Mandiri memberikan dampak positif terhadap tingkat kemiskinan di sana. Proses pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui proses yang berlarut-larut sehingga memunculkan

partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam menyukseskan program BKM, kemudian mampu menekan angka kemiskinan di Kelurahan Demangan setiap saat.

Meskipun tujuan penelitian di atas dan studi tentang pemberdayaan masyarakat memiliki kesamaan, namun keduanya memiliki perbedaan. Menurut penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, upaya nasional untuk pemberdayaan masyarakat harus diprioritaskan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Makalah ini juga menyoroti pendekatan pemerintah desa dalam memperkuat kelompok tani.

"Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)" adalah entri Jurnal Chandra K. P. yang kelima. Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah untuk membantu peningkatan kemandirian masyarakat secara bertahap adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Tiga puluh persen dari dana ADD akan digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sementara tujuh puluh persen sisanya akan diinvestasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintah desa.

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk menentukan faktor pendorong dan penghambat pengelolaan ADD melalui pemberdayaan. Para peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis Milles dan Huberman, di antara alat analisis lainnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebagian anggaran

ADD yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat lokal justru digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari pemerintah daerah dan BPD. Salah satu elemen kunci dalam pengelolaan ADD adalah pelibatan masyarakat, yang diikuti oleh faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia dan tidak adanya pengawasan langsung dari masyarakat.

Studi-studi ini dapat dibandingkan satu sama lain dalam hal kemampuan mereka untuk memberdayakan masyarakat lokal. Studi yang disebutkan di atas menekankan pada penelusuran bagaimana masyarakat desa menggunakan uang mereka, sedangkan studi ini melihat lebih dekat bagaimana pemerintah daerah benar-benar mendukung kelompok tani (ADD).

Keenam "Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Tani Desa Basaan 1, Kecamatan Ratatotok)," sebuah artikel jurnal oleh Michael Wurangian menyampaikan kekayaan alam nusantara dengan bahan makanan pokok dari pertanian. Untuk memerangi kemiskinan, penting untuk membicarakan pemberdayaan masyarakat petani. Mengedukasi masyarakat terkait pentingnya sektor pertanian. Terdapat petani yang berlangsung bergenerasi. Institusi publik dan swasta menjadi daya tarik profesi bagi masyarakat. Industri pertanian tidak lagi dipandang sebagai industri yang baik. Untuk berkembang, desa membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat.

Konsep yang dikemukakan oleh Andrew (2005) yang menyatakan bahwa strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengekspresikan tujuan, maksud, atau sasaran yang menghasilkan sebuah kebijakan dan

merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan membuat rincian tentang apa yang diinginkan, digunakan untuk menganalisis strategi pemberdayaan yang digunakan oleh pemerintah desa dalam penelitian ini. Andrew (2005) menyatakan bahwa strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengekspresikan tujuan, maksud, atau sasaran yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan membuat rincian tentang apa yang diinginkan. Struktur, perilaku, dan budaya di mana sebuah proses berlangsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi. Namun, ada dua komponen penting dalam operasi saat ini. Faktor-faktor ini sangat penting untuk tujuan analisis. Perumusan dan implementasi adalah masalahnya.

Penelitian bertujuan mengenali pendekatan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Basaan 1, khususnya di bidang pertanian. Karena pertanian menjadi tumpuan hidup serta sumber kesejahteraan masyarakat Untuk membantu penyelesaian investigasi ini, digunakan metode penelitian kualitatif.

"Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani (studi kasus di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)" merupakan jurnal Thopilus Aisnak yang ketujuh. Penelitian bertujuan mengenali langkah pemerintah desa Banjarejo memberdayakan masyarakat petani. Profesi masyarakat serta aspek geografis menjadi landasan profesi perani menjadi dominan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur menjadi rencana yang dilakukan otoritas setempat. Namun, tidak ada rencana untuk meningkatkan kemampuan organisasi petani dalam mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan penghidupan petani. Fasilitasi pertumbuhan komunitas petani melalui pembentukan organisasi petani di Desa Banjarejo. Padahal mayoritas penduduk di Desa Banjarejo adalah petani. Artinya, meskipun dana desa untuk program petani telah diturunkan untuk setiap kelompok pada setiap dusun (terdapat 21 dusun), pelaksanaan rencana tersebut hanya berhenti di tempat. Anggaran yang diturunkan oleh pemerintah desa tidak digunakan sebagaimana mestinya karena pemerintah desa setempat tidak memiliki rencana pelaksanaan program berdasarkan anggaran tersebut, sehingga program tersebut tidak berjalan.

Metode penelitian yang diklasifikasikan sebagai kualitatif dan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini adalah warga Desa Banjarejo. Partisipan tersebut antara lain Sekretaris Desa Banjarejo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo, Penyuluh Pertanian Lapangan, Dukuh Desa Banjarejo, Mantan Pengurus Gapoktan Banjar Arum, Pengurus Kelompok Wanita Tani, dan Masyarakat Tani Desa Banjarejo. Sisanya adalah masyarakat Desa Banjarejo. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yang disebut purposive random sampling.

"Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Kelompok Perempuan Petani (studi kasus di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan,

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)" merupakan judul skripsi Emilia, G. E. yang kedelapan. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk memberikan mereka kontrol dan akses terkait sumber daya dan kekayaan wawasan. Perempuan mampu diberdayakan dengan bergabung dengan kelompok-kelompok tani guna meningkatkan partisipasi dalam pengembangan bidang tani. Keterlibatan pemerintah desa sangat diperlukan agar pemberdayaan perempuan berhasil. Kesejahteraan perempuan sangat ditingkatkan oleh pemerintah desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Kraguman memberdayakan Kelompok Wanita Tani Bina Melati dengan memberikan pemberdayaan, penguatan, perlindungan, pendampingan, dan pemeliharaan. Kelompok Wanita Tani Bina Melati di Desa Kraguman saat ini menghadapi dua tantangan, yaitu sulitnya mengalokasikan waktu dan sulitnya mendapatkan pendanaan. Kelompok Wanita Tani Bina Melati memiliki dua strategi untuk mengatasi masalah ini: melakukan pertemuan rutin sebulan sekali dan berkonsultasi dengan Pemerintah Desa Kraguman. Karena produk yang dihasilkan masih sedikit, Kelompok Wanita Tani Bina Melati belum menyebarluaskan produknya kepada masyarakat Desa Kraguman di luar keanggotaan kelompok.

Studi deskriptif kualitatif adalah studi yang satu ini. Penelitian ini membahas tentang Kepala Desa Kraguman dan semua hal yang telah dilakukannya untuk Kelompok Wanita Tani dalam membantu, memperkuat, melindungi, mendukung, dan mempertahankan kelompok tersebut. Subjek

penelitian ini terdiri dari sepuluh orang, termasuk kepala desa, ketua kelompok wanita tani, bendahara kelompok, pengurus unit sarana dan prasarana produksi, anggota kelompok, dan tokoh masyarakat. Proses pencarian informan untuk penelitian ini dilakukan secara terencana. Data dikumpulkan melalui kombinasi wawancara langsung, catatan lapangan tertulis, dan analisis observasi. Investigasi ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Studi-studi yang disebutkan di atas membahas pemberdayaan masyarakat dengan cara yang pada dasarnya sama. Meskipun penelitian-penelitian tersebut sebagian besar berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok petani perempuan, investigasi saat ini lebih memfokuskan pada organisasi petani.

"Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (studi kasus di Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara)" adalah subjek dari Jurnal kesembilan Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang ada saat ini dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat membekali masyarakat desa dengan lebih baik. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Proyek ini dilaksanakan di Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang dana desa yang telah diterjemahkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa mendominasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa, masyarakat

tidak berpartisipasi aktif, dan pemerintah desa kebingungan dalam mengelola dana desa. Masyarakat kurang percaya terhadap aparat pemerintah desa karena administrasi dana desa dilaporkan secara vertikal ke kecamatan, bukan ke masyarakat. Pembangunan jalan dan pengelolaan sampah dinilai sebagai inisiatif pemberdayaan, tetapi PKK dan pelatihan resmi pemerintah desa dianggap sebagai kegiatan pemberdayaan non-fisik (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa mendominasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa, masyarakat tidak berpartisipasi aktif, dan pemerintah desa kebingungan dalam mengelola dana desa. Masyarakat kurang percaya terhadap aparat pemerintah desa karena administrasi dana desa dilaporkan secara vertikal ke kecamatan, bukan ke masyarakat. Pembangunan jalan dan pengelolaan sampah dinilai sebagai inisiatif pemberdayaan, tetapi PKK dan pelatihan resmi pemerintah desa dianggap sebagai kegiatan pemberdayaan non-fisik (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

"Strategi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Desa Sabbeta (studi kasus di Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)" merupakan artikel kesepuluh yang ditulis oleh Ramdhana, Usman, dan Mone. Desa Sabbeta menjadi pusat pengembangan industri sutera, mulai awal sampai penghujung. Istilah "desa sutera" dipilih untuk mencerminkan sebagian besar kegiatan masyarakatnya, yang meliputi pemeliharaan ulat sutera hingga menjadi kain sutera. Di Kabupaten Soppeng, Desa Sabbeta menjadi identitas

lokal bagi para petani dan pengrajin sutra. Desa Sabbeta juga dikenal sebagai Desa Sutra karena namanya berasal dari bahasa Bugis, sabbe, yang berarti sutra. Karena berfungsi sebagai pusat pemberdayaan asosiasi, kampung ini dikenal sebagai kampung Sabbeta. Dalam berbagai usaha yang terkait dengan usaha pembinaan yang dijalankan masyarakat di Kampung Sabbeta, Kampung Sabbeta menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditentukan bahwa (1) strategi fokus digunakan untuk memusatkan penjualan pada sistem pesanan, (2) pendekatan diferensiasi digunakan dengan memproduksi varietas sutra yang baru, dan (3) strategi keunggulan biaya tidak umum digunakan karena tingginya biaya produksi sutra. Desa Sabbeta terhambat dalam pengembangannya karena beberapa hal, termasuk (namun tidak terbatas pada) (4) kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan dan (5) kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.

Desa Sabbeta sedang dibangun di Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rencana pemerintah dalam membangunnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode dokumentasi, observasi, dan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi untuk penelitian ini. Metode untuk memilih informan adalah dengan memilih orang-orang yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan Kampung Sabbeta. Kualitas data dilihat dari kualitasnya. Penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membuat

komunitasnya menonjol memiliki banyak kesamaan. Penelitian yang disebutkan di atas, di sisi lain, lebih membahas tentang bagaimana membuat sutra membantu desa berkembang, sementara penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana bertani dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri.

G. Kerangka Konseptual

1. Konsep Governmentality

Governmentality merupakan konsep yang pertama kali dikembangkan oleh filsuf Prancis Michel Foucault pada tahun 1977. Governmentality sebagai bentuk relasi kekuasaan yang merupakan perluasan kekuasaan yang lebih dari *disciplinary power*. Jika objek *disciplinary power* adalah tubuh individu, maka subjek Governmentality adalah populasi (tubuh sosial). Bentuk pengetahuan dalam model governmentality berupa politik ekonomi. Oleh karena governmentality adalah perluasan model kekuasaan *disciplinary power* pada level negara, maka yang dibicarakan dalam governmentality adalah isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara, Mudhoffir, 2011.

Penggunaan aparatus pada governmentality untuk mengontrol tubuh sosial juga memanfaatkan fungsi wacana dan produksi pengetahuan. Namun, bentuk pengetahuannya bukan dihasilkan melalui definisi ilmiah dan klaim kebenaran yang cenderung elitis dan metodologis, melainkan

pengetahuan tentang politik-ekonomi yang dapat berbentuk kebijakan atau seperangkat aturan yang mengatur ketertiban masyarakat. *Governmentality* adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau *legitimate*. Dengan ini kekuasaan yang dijalankan negara tidak melahirkan anti-kekuasaan atau resistensi. Praktik *governmentality* mengaburkan beroperasinya kekuasaan terhadap populasi. Melalui *governmentality*, kekuasaan diinternalisasikan dalam tubuh sosial seperti halnya model *disciplinary power* yang menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu.

Model *governmentality* Foucault ini berada di antara *strategic games* dan dominasi. *Governmentality* hanya mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct of conduct*, suatu relasi kekuasaan yang dibangun dengan mengandaikan adanya kebebasan tetapi sekaligus mengarahkan (Foucault 1982b).

2. Konsep Strategi

Seberapa baik ide strategi dan ide-ide terkait lainnya dipahami akan mempengaruhi seberapa baik strategi yang disusun bekerja. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1998 mengatakan bahwa (1) Strategi suatu negara adalah hasil dari upaya-upaya untuk memanfaatkan pengetahuan, dan strategi merupakan ilmu pengetahuan dan seni. (2) Seperangkat

langkah yang telah diperhitungkan yang diambil dengan tujuan akhir. Lalu ada gagasan tentang sebuah rencana. Pada tahun 2003:341, B. N. Marbun mengatakan bahwa “Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran”.

Dari apa yang telah dikatakan sejauh ini, jelaslah bahwa strategi adalah ilmu dan seni dalam merencanakan secara cermat kebijakan serta agenda yang direncanakan dengan mempertimbangkan kemampuan demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

3. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah lokal di desa adalah contoh birokrasi modern yang bertanggung jawab atas administrasi dana publik dan pengumpulan pendapatan pajak. Sebagai lembaga modern, pemerintah desa perlu membangun kredibilitasnya melalui berbagai hal seperti kinerja politik dan ekonominya serta legitimasi sosial dan simbolisnya. Penyelenggara sistem birokrasi dari pemerintah pusat. Mereka memberi desa kekuasaan guna mengontrol dan mengurus warganya.

Pemerintah desa adalah entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan UU No. 6 Th 2014 tentang Desa. Kepala Desa, yang sering disebut sebagai "pemerintah desa", dibantu oleh Perangkat Desa, yang juga dikenal dengan nama lain. Pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan, dan sekretariat desa bersama-sama membentuk perangkat desa. Ini berarti Kepala Desa dan perangkat

desa bekerja sama membentuk pemerintahan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan beberapa perangkat desa.

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahan desa, memastikan desa tumbuh dan berkembang, dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada masyarakat desa. Kepala desa adalah orang yang paling berpengaruh di desa, meskipun faktanya sebuah desa lebih dari sekadar administrasi, penduduk, dan lokasi fisiknya. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara umum mengamanatkan bahwa kepala desa adalah pemimpin masyarakat yang independen dan bukan pegawai negeri sipil. Jadi, pemimpin perlu mengukuhkan eksistensi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pemimpin pemerintahan, kepala desa bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk mengawasi masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan. Untuk itu, sangat penting bagi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya untuk memiliki jalur komunikasi yang terbuka untuk memastikan kelancaran administrasi.

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah desa menguraikan pendelegasian wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan tugas kepada kelompok kerja dan orang-orang tertentu. Struktur organisasi menggambarkan prosedur yang berlaku untuk melaksanakan pekerjaan perusahaan, termasuk garis hierarki dan garis horizontal wewenang dan tanggung jawab.

Ketentuan UU No. 6 Th 2014 tentang Desa, yang mengatur (1) kedudukan, tugas, wewenang, dan hak kepala desa; dan (2) susunan perangkat desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, menunjukkan bagaimana struktur organisasi secara implisit telah dipilih. Di sisi lain, UU No. 6 Tahun 2014 menyerahkan aturan tambahan terkait pencalonan dan pemberhentian perangkat desa pada peraturan pemerintah, bukannya menguraikan bentuk organisasi yang tepat untuk pemerintahan desa.

Peraturan yang lebih mendalam tentang kepala desa dan perangkat desa dapat ditemukan dalam PP No. 43 Th 2014, yang telah diperbarui beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Th 2019. Jumlah jabatan sekretariat, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis di dalam pemerintahan desa sekarang dapat digunakan sebagai unit deskriptif. Perlu dicatat bahwa peraturan menteri tidak secara eksplisit memberikan kewenangan atas kerangka struktural pemerintahan desa. Namun, menurut Pasal 62 dan 64, Mendagri diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur secara spesifik pelaksanaannya.

Perangkat Desa diatur secara lebih rinci dalam Permendagri No. 84 Th 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang meliputi:

- 1) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan, unsur pelaksana teknis, dan unsur pimpinan, antara lain: (1) Sekretariat Desa membawahkan

paling sedikit dua urusan, yaitu Urusan Tata Usaha dan Urusan Perencanaan dan Keuangan, dan paling banyak tiga urusan, yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan; (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditetapkan secara metodologis dengan memperhatikan faktor-faktor seperti luas wilayah kerja, karakteristik wilayah, geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, serta sumber daya keuangan masyarakat secara keseluruhan. Kepala Dusun atau tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan rencana tersebut. (3) Pelaksanaan teknis harus memiliki setidaknya dua bagian: bagian pemerintahan dan bagian kesejahteraan dan pelayanan. Dapat tersusun dari: pemerintahan, kesejahteraan serta pelayanan, dan pelayanan.

- 2) Desa ini menyatakan dengan sangat jelas hal-hal berikut ini: Adalah mungkin, tetapi tidak opsional, untuk Swadaya Desa Wakarsa untuk memiliki tiga urusan dan tiga bagian yang terpisah. Pemerintahan Desa Swadaya, termasuk kepala desa, sekretariat, urusan, pelaksana kewilayahan, dan bagian-bagian ada banyak pekerjaan, tanggung jawab, dan tugas yang berbeda. Desa memiliki dua urusan dan dua bagian.

- 3) Tugas kepala desa adalah mengawasi dan memberi tahu bawahannya bagaimana melakukan pekerjaan mereka.
- 4) Peraturan bupati/walikota menjelaskan detail sistem serta tupoksi pejabat desa.

b. Kewenangan Pemerintah Desa

Kemampuan untuk mengendalikan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat merupakan kewenangan pemerintah desa. Kepentingan masyarakat setempat dan kegiatan pemerintahan menjadi fokus kewenangan untuk diawasi dan dikendalikan. Pada intinya, urusan pemerintahan terdiri dari tiga kegiatan: pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Membuat regulasi terkait penggunaan dan larangan saat menggunakan sumber daya publik. Sementara itu, peran pemerintah dalam pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menggunakan dan mengakses sumber daya publik dan memaksimalkan peluang dan sumber daya yang tersedia.

Kalimat "kepentingan masyarakat setempat" sebagian besar merupakan bagian dari apa yang menjadi perhatian pemerintah. Namun terdapat beda persepsi antara regulasi pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Peraturan dan hukum mengatakan bahwa urusan pemerintah terkait dengan membantu masyarakat. Kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yang terkait dengan kehidupan sehari-

hari dan sarana untuk bertahan hidup dan yang berasal dari usaha, ukuran, dan lokasi masyarakat (lokal).

Mengatur (*public regulation*), menyediakan (*public goods*), dan memberdayakan (*community empowerment*) masalah lingkungan desa, menurut penelitian ini, berada di dalam ruang lingkup pemerintahan desa (*empowerment*). Segala upaya dilakukan untuk memaksimalkan dampak positif dari kewenangan pemerintah desa untuk kepentingan warga desa.

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat dapat dipahami sebagai proses di mana individu dan kelompok dimampukan untuk menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam mengejar keadilan sosial dan ekonomi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, perubahan perilaku, dan tindakan kolektif. Dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 Nomor 6 Bab 1 pasal 1 ayat 12. Melalui implementasi kebijakan, program kegiatan, dan dukungan yang disesuaikan dengan inti permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong tumbuhnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat berarti memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh anggotanya untuk berkembang secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya secara mandiri, serta mewujudkan potensi

mereka secara penuh sebagai individu. Memberdayakan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, membutuhkan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat untuk mendorong pengembangan potensi masyarakat melalui perluasan fungsi, produksi yang dapat dilakukan, dan efisiensi dalam melakukannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu prosedur untuk mengubah struktur masyarakat yang diperlukan yang dilakukan oleh masyarakat dan memiliki tujuan akhir kesejahteraan (Mulyono, 2008). Untuk memberdayakan masyarakat, peluang keterlibatan masyarakat dibutuhkan dalam suatu pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, di mana pemerintah melibatkan masyarakat untuk membantu memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengatasi masalah yang muncul.

Pemberdayaan lebih merupakan "proses menjadi" daripada "proses melakukan". Sebagai sebuah langkah, pemberdayaan memiliki 3 langkah: menjadi sadar, menjadi mampu, dan menjadi berdaya (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Hal ini dapat diringkas menjadi:

1) Tahap Penyadaran

Target pemberdayaan "disadarkan" selama tahap penyadaran, ketika mereka menjadi sadar bahwa mereka memiliki hak atas "sesuatu". Kaum miskin, misalnya, adalah kelompok yang menjadi

target, dan mereka diberitahu bahwa mereka dapat menjadi berada jika mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan. Agenda dengan contoh menerbitkan wawasan pemulihan Ide dasarnya adalah meyakinkan target bahwa pemberdayaan adalah sesuatu yang mereka butuhkan dan dimulai dari diri mereka sendiri.

2) Tahap Pengkapasitasan

Inilah yang sering kali dimaksudkan orang ketika mereka mengatakan "membangun kapasitas" atau "memampukan". Sebelum memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada seseorang, Anda harus memastikan bahwa mereka mampu. Sebagai contoh, daerah yang telah disetujui harus memiliki program untuk membangun kapasitas mereka sebelum diberikan otonomi daerah, sehingga mereka akan "mampu" mengelola otonomi yang diberikan.

3) Tahap Pendayaan

Tahap pemberdayaan, atau pemberdayaan terbatas, adalah ketika kekuasaan benar-benar diberikan. Sekarang, target telah diberi wewenang, kekuasaan, atau kesempatan.

b. Pemberdayaan Masyarakat Tani

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 19 Th 2013 terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Upaya-upaya untuk meningkatkan pemberdayaan petani antara lain dengan meningkatkan

kapasitas mereka dalam mengelola usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, serta kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya lainnya.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, strategi pembangunan harus selalu mengutamakan proses daripada produk. Proses yang cepat memungkinkan untuk melakukan pembangunan yang baik bagi masyarakat. Dari sudut pandang ini, melibatkan masyarakat dalam pembangunan lebih merupakan partisipasi daripada mobilisasi. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal klien program karena masyarakat ikut membuatnya.

Pada akhirnya, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk karir dan keahlian mereka sehingga mereka dapat bekerja dan berjuang sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan non-formal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan orang-orang yang ingin belajar lebih banyak cara untuk melakukannya yang tidak mungkin atau tidak

didukung oleh pendidikan formal. Salah satu bagian dari hal ini adalah memberdayakan masyarakat.

Ketika masyarakat diberdayakan, mereka mendapatkan otonomi untuk menangani semua potensi sumber daya mereka tanpa campur tangan pihak luar. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah terbentuknya orang-orang dan kelompok yang mandiri. Otonomi tersebut mencakup kemampuan mereka untuk membuat keputusan sendiri tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia.

Adisasmita (2013:78) menyampaikan, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat asli, marjinal, dan kecil agar masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan, namun tetap dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

d. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Banyak profesional yang telah menggunakan teknik-teknik pemberdayaan secara ekstensif. Pandangan Usman (2004:36), yang dikutip sebagai sumber dalam tulisan ini, adalah bahwa taktik atau tindakan yang membantu pemberdayaan, diantaranya:

- 1) Strategi langkah pertama: membina lingkungan yang melindungi sekaligus memperkuat kekuatan. Pada pemberdayaan masyarakat, penting untuk mempertimbangkan sudut pandang: pemungkinan,

pemberdayaan, dan perlindungan. Memampukan adalah proses membangun lingkungan sehingga menggali potensi masyarakat.

- 2) Rencana B: program-program untuk pembangunan pedesaan. Pemerintah telah memulai sejumlah program untuk pembangunan pedesaan, termasuk strategi pusat pertumbuhan, pengembangan masyarakat desa terpadu, dan industrialisasi pedesaan.

Kemudian menurut Usman (2004), pengembangan masyarakat terpadu memiliki enam bagian, yaitu: pengembangan pertanian padat karya, lebih banyak kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja dengan industri kecil, meningkatkan kemandirian dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, menciptakan daerah perkotaan yang dapat membantu pembangunan pedesaan, dan membangun kelembagaan kelompok tani yang dapat mengoordinasikan proyek-proyek di berbagai sektor.

Salah satu kelompok yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan industri pertanian adalah Kelompok Tani. Industri pertanian di desa dapat berkembang berkat adanya organisasi petani. Pemerintah desa harus memberdayakan kelompok tani agar masyarakat dapat memahami hal ini.

Pendekatan pemberdayaan yang dikenal dengan pendekatan 5P atau pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dapat digunakan untuk melaksanakan pemberdayaan

pada kelompok tani. Strategi pemberdayaan 5P adalah sebagai berikut, menurut Edi Suharto (2005: 67-68):

1) Pemungkinan

Kata "kemungkinan" tidak sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Cara lain untuk menerjemahkan kata "memungkinkan" adalah "mungkin". Edi Suharto menyatakan bahwa frasa "kemungkinan" dan "faktor pemungkin", yang penggabungan aspek di mana kemampuan serta prasarana menjadi komponen pendukung guna mempengaruhi sikap, memiliki arti yang serupa. Bangunan layanan publik adalah sumber. Ketersediaan sumber daya yang beragam dengan harga yang terjangkau serta biaya-biaya lainnya terkait dengan elemen pemungkin ini. Oleh karena itu, kita harus menawarkan kesempatan atau elemen pendukung kepada masyarakat agar mereka dapat mengubah cara pandang, tindakan, dan rutinitas mereka.

Potensi untuk menumbuhkan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat tumbuh dengan cara terbaik. Hambatan-hambatan budaya dan kelembagaan yang menindas anggota masyarakat harus dihilangkan melalui pemberdayaan.

2) Penguatan

Tujuan dari penguatan masyarakat adalah untuk memajukan kemampuan masyarakat dalam menanggapi isu-isu sosial yang mendesak. Pemberdayaan diperlukan untuk mengembangkan

semua kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang mendukung kemandirian mereka.

3) Perlindungan

Tujuan perlindungan adalah untuk mencegah penindasan terhadap kelompok yang lemah, menghilangkan permusuhan tidak sehat juga pemerasan Menghilangkan segala bentuk dominasi dan prasangka yang merugikan kelompok yang kurang beruntung harus menjadi tujuan utama pemberdayaan.

4) Penyokongan

Agar masyarakat dapat memenuhi tanggung jawabnya dan menyelesaikan tugas sehari-hari, bantuan diberikan dalam bentuk saran dan pendampingan. Untuk mencegah masyarakat menjadi semakin lemah dan terpinggirkan, pemberdayaan harus mampu mendukungnya.

5) Pemeliharaan

Tujuan dari pemeliharaan adalah untuk menjaga lingkungan yang menguntungkan bagi keseimbangan kekuatan yang berkelanjutan antara berbagai kelompok sosial. Agar setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalankan bisnis, pemberdayaan harus mampu menjaga perdamaian dan keseimbangan.

Perspektif yang diungkapkan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Kelompok Tani dapat diberdayakan melalui perencanaan, pendidikan, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan membangun

kemandirian masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi tanpa bantuan pemerintah atau kelompok non-pemerintah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah sebuah penelitian yang bertujuan melakukan eksplorasi, memperdalam pengetahuan, mencari ide baru, untuk merumuskan masalah secara lebih rinci untuk kemudian diputuskan apakah perlu dilakukan penelitian baru. Penelitian eksploratif biasanya hanya mengembangkan hipotesis yang ada, bukan untuk menguji sebuah hipotesis yang lain. Penelitian ini bertujuan memberi definisi dan penjelasan soal konsep dan pola yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Karena sifat eksploratif, interdisipliner, dan komprehensif dari penelitian ini, para peneliti akan terdorong untuk melihat topik-topik secara lebih mendalam daripada yang seharusnya. Analisis data primer pada penelitian ini biasanya bersifat kualitatif, dengan sampel penelitian jumlahnya sedikit atau terbatas.

Penelitian eksploratif bertujuan untuk melihat lebih dalam suatu masalah, agar memiliki pemahaman yang lebih baik soal permasalahan yang ada. Penelitian ini dibuat untuk mendapatkan ide-ide dan gagasan tentang permasalahan pokok ataupun mengembangkan hipotesis yang ada. Hasil penelitian tersebut akan bisa menjadi jawaban apakah diperlukan penelitian selanjutnya yang lebih besar atau tidak, dengan ini merupakan penelitian awal yang bersifat sangat luas. Artinya, dalam beberapa kasus, penelitian awal ini sangat penting karena jadi landasan untuk diadakannya penelitian lanjutan.

Penelitian ini juga digunakan untuk menyelidiki suatu masalah yang belum diteliti secara menyeluruh atau sebagian pada masa lalu. Selain itu, penelitian ini dapat membiasakan masyarakat umum dengan isu-isu yang sedang berkembang dengan memberikan rangkuman poin-poin penting dari perdebatan yang ada di sekitarnya. Selain itu, studi ini menggeneralisasi konsep dan membangun teori, meskipun masih bersifat sementara, yang memungkinkan adanya kemungkinan penelitian di masa depan tentang topik yang sedang dibahas dan membantu menentukan metode dan jalur yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian tersebut.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah bagian diskrit dari keseluruhan yang berfungsi sebagai fokus investigasi. Fokus atau komponen yang diteliti dapat dianggap sebagai unit analisis. Para peneliti melakukan tingkat investigasi

ini untuk memastikan bahwa temuan mereka akurat dan dapat dipercaya. Karena alasan sederhana, para akademisi tidak selalu dapat mengidentifikasi subjek, objek, dan sumber data dengan tepat. Satu orang, satu kelompok, satu organisasi, satu objek, satu tempat, atau satu periode waktu dapat menjadi unit analisis penelitian. Penting untuk dicatat bahwa berikut ini adalah unit analisis studi:

a. Obyek Penelitian

Topik penelitian dalam studi ini adalah strategi pemerintah desa dalam membina komunitas penyamak kulit di Kerten. Dalam penelitian ini, "Upaya pemerintah desa" mengacu pada kewenangan pemerintah desa untuk mengadopsi kebijakan dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan penduduk setempat, terutama mereka yang menjadi bagian dari komunitas Kelompok Tani dan yang kebutuhannya harus dipenuhi agar komunitas tersebut dapat berkembang.

b. Subyek Penelitian

Kepala desa, pengurus atau pengelola kelompok tani, petani, dan tokoh masyarakat di Desa Kerten menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini. Topik ini dipilih karena berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti dan akan menghasilkan informasi dan data yang berguna.

Penelitian ini difokuskan pada Kepala Desa Kerten, pengurus atau pengelola kelompok tani, petani, dan tokoh masyarakat. Masalah

penelitian yang dikaji relevan dengan subjek penelitian, dan bertujuan mendapatkan data yang mendukung temuan penelitian.

- 1) Kepala Desa Kerten;
- 2) Pengurus atau pengelola Kelompok Tani (2 orang);
- 3) Anggota Kelompok Tani (6 orang); dan
- 4) Tokoh masyarakat (1 orang).

Tabel 1. 1 Daftar Informan

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1.	Suyadi S.Sos	56 tahun	Laki-laki	Kepala Desa Kerten	Sarjana S1
2.	Warso	63 tahun	Laki-laki	Ketua Kelompok Tani Makmur Widodo	SMA/ sederajat
3.	Gunardi	35 tahun	Laki-laki	Bendahara Kelompok Tani Makmur Widodo	SMA/ sederajat
4.	Danang	26 tahun	Laki-laki	Anggota Kelompok Tani Makmur Widodo	Sarjana S1
5.	Sutarni	55 tahun	Perempuan	Anggota Kelompok Tani Makmur Widodo	SMA/ sederajat
6.	Muji Pamungkas	63 tahun	Laki-laki	Ketua Kelompok Tani Bayem Panguripan	SMA/ sederajat
7.	Sumbono	50 tahun	Laki-laki	Bendahara Kelompok Tani Bayem Panguripan	SMA/ sederajat
8.	Dwi	40 tahun	Laki-laki	Anggota Kelompok Tani Bayem Panguripan	SMA/ sederajat
9.	Warsito	52 tahun	Laki-laki	Anggota Kelompok Tani Bayem Panguripan	SMA/ sederajat
10.	Agus	38 tahun	Laki-laki	Tokoh Masyarakat	Sarjana S1

c. Lokasi Penelitian

Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah menjadi lokasi penelitian studi ini. Lokasi ini

dipilih karena pemerintah desa belum melakukan pemberdayaan kelompok tani dengan baik di lokasi sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Burhan Bungin, salah satu komponen instrumen pengumpulan data yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah penelitian adalah metode pengumpulan data. Kemampuan untuk mengumpulkan data secara cepat, tepat, dan dengan cara yang disesuaikan dengan tugas yang dihadapi sangat penting dalam skenario semacam ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam investigasi ini adalah:

a. Observasi

Salah satu cara peneliti mendapatkan informasi adalah dengan mengawasi subjek atau objek penelitian mereka dengan menggunakan semua indera yang mereka miliki. Dengan mempelajari interaksi di dunia nyata, peneliti dapat belajar lebih banyak tentang apa yang memotivasi tindakan orang dan apa yang diwakili oleh tindakan tersebut.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Untuk menciptakan kegiatan dan peristiwa, serta untuk mengkonfirmasi dan menambah data, langkah ini diterapkan. Untuk mencapai poin dan tujuan yang telah ditetapkan, teknik wawancara ini menggunakan referensi wawancara yang hanya memberikan gambaran umum tentang prosedur dan isinya.

c. Dokumentasi

Tulisan, sketsa, atau karya seni berskala besar adalah contoh dokumentasi, yang merupakan catatan masa lalu. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Data primer yang telah dikumpulkan (wawancara dan observasi) perlu dilengkapi dengan data sekunder ini. Dokumentasi dapat berupa profil lokal, artikel, atau berita layanan publik yang diperoleh dari media dan lainnya. Catatan visual dari hasil observasi kerja lapangan oleh peneliti juga dapat digunakan dalam dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam investigasi ini, kami menggunakan pendekatan interaktif untuk analisis data yang serupa dengan yang diusulkan oleh Miles dan Huberman untuk digunakan pada data lapangan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang membentuk rencana analisis data:

a. Pengumpulan Data

Dalam catatan lapangan, yang memiliki dua komponen, yaitu deskripsi dan refleksi, informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat. Pengalaman dan pengamatan pribadi peneliti disertakan dalam deskripsi. Sementara itu, catatan refleksi adalah dokumen peneliti dalam mendokumentasikan pemikiran, analisis serta interpretasi mereka pada temuan mereka.

b. Reduksi Data

Metode penelitian yang dikenal sebagai "reduksi data" berfokus pada ringkasan, abstraksi, dan transformasi informasi yang telah dikumpulkan dari catatan-catatan lapangan yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Data laporan ini disajikan dengan cara yang memudahkan pembacaan dan pemahaman, baik secara keseluruhan maupun masing-masing bagian. Potongan-potongan ini ditulis dengan cara yang jelas dan mudah dibaca.

d. Triangulasi Sumber Data

Teknik untuk mengevaluasi keandalan data diperlukan dalam penelitian. Sementara itu, sejumlah strategi harus digunakan untuk menilai kredibilitas guna mendapatkan keabsahan temuan (pemeriksaan sejawat melalui diskusi).

Triangulasi, Pelacakan validitas digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan informasi yang akurat dikumpulkan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data dengan kumpulan data independen. Berikut ini adalah langkah-langkah operasional yang dapat digunakan untuk melaksanakannya:

- 1) Membandingkan informasi dari wawancara dengan apa yang dilihat dan didengar;
- 2) Menganalisis hasil penelitian dengan keadaan dan perspektif seseorang.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kerten

Desa Kerten lahir dan terbentuk pada tahun 1935, terletak di kaki Gunung Mintorogo, yang terletak di sebelah selatan wilayah Gantiwarno. Desa Kerten merupakan sebuah desa yang mempunyai penduduk rukun, makmur dan damai. Kemakmuran penduduk desa Kerten tampak pula melalui tanah yang sangat subur untuk bercocok tanam. Setelah bertahun-tahun bercocok tanam dengan hasil yang melimpah, masyarakat desa pun lupa akan adanya Sang Pencipta dan menjadi tamak, pada akhirnya hasil panen semakin menurun, banyak hama tanaman yang merusak tanaman. Para petani mengeluh hasil panen yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Mitos tersebut beredar di masyarakat desa dan membuat masyarakat percaya serta yakin jika ingin mendapatkan hasil panen melimpah masyarakat desa harus membuat kue apem setiap bulan suro, tepatnya setiap hari Senin Kliwon dan harus membagikannya kepada sanak saudara. Sedangkan sebagian dari kue apem tersebut harus ada yang digantungkan di luar rumah agar tidak tertimpa musibah hingga berujung kepada kematian akibat hasil panen yang tidak baik. Berkaitan dengan hal tersebut kepala desa wilayah memberi nama Kerten yang artinya Kerta Raharjo dan sekarang bisa dibuktikan penduduk desa Kerten banyak yang sukses, hasil pertanian melimpah sehingga penduduk Kerten sampai sekarang melestarikan tradisi tersebut dengan membuat kue apem setiap bulan suro dan berbagi kepada sanak saudara.

Desa Kerten menjadi wilayah administrasi Kecamatan Gantiwarno, cikal bakal orang yang tinggal di Desa Kerten adalah Ki Demang Ndermo Redjo, sosok fenomenal yang ditunjuk menjadi ketua pada masa Belanda. Mampu menyalurkan air dari Gunung Mitorogo melalui tongkat yang ditancapkan di tanah. Pada saat itu Desa Kerten dipimpin oleh Ki Demang Ndermo Redjo dilanjutkan oleh kepemimpinan yang disebut Lurah diangkat oleh Belanda, pada zaman penjajah yang bernama Kyai Singo Sentoso pada masa pemerintahan Belanda-Jepang, Kerten berada dibawah kekuasaan Keraton Mangkunegaran.

Semenjak saat itu, sebelum Indonesia Merdeka Pemerintah Desa Kerten dan sampai Merdeka tahun 1945 resmi dipimpin oleh seorang Lurah sampai beralih dengan Kades. Berikut pemimpin setelah Indonesia Merdeka diantaranya: Ki Demang Ndermo Redjo Kerten, Singo Sentono, Wiro Sumarto, Purwo Sumarto, Soehartono Karteker, Soehartono, Soehartono, Sihono, Sarta, A.Md.Pd, dan Suyadi, S.Sos.

Nama-nama di atas menunjukkan bahwa dari masa masa telah berganti kepemimpinan Lurah/Kepala Desa Kerten sebanyak 11 kali, dan dimana semuanya berjenis kelamin laki-laki. Ini dapat dilihat bahwa di Desa Kerten belum adanya Lurah/Kepala Desa yang berjenis kelamin perempuan sampai dengan periode sekarang.

B. Kondisi Geografis

Mengenali tata letak serta kondisi geografis dari suatu wilayah mampu menjadikan perencanaan dan pembuatan regulasi menjadi lebih bermanfaat pada

masyarakat. Permasalahan mampu diatasi dengan solusi yang tepat serta mengarah dengan tepat, sehingga regulasi menjadi salah satu langkah mengatasi hal tersebut.

Desa Kerten merupakan satu desa dari 16 desa di Kecamatan Gantiwarno. Desa dengan luas 1.451.750 Ha. Serta 9 RW dan 20 RT memiliki 11 Pedukuhan, yakni Pedukuhan Tenggil, Pedukuhan Ngesong, Pedukuhan Ngandong, Pedukuhan Kepoh, Pedukuhan Gedongan, Pedukuhan Petung, Pedukuhan Sangiran, Pedukuhan Jontro, Pedukuhan Gunung Wungkal, Pedukuhan Kalijuwah dan Pedukuhan Berjo.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut Penggunaannya

No.	Keterangan	Luas	Presentasi (%)
1.	Luas tanah sawah	164,99 Ha	20,58 %
2.	Luas tanah kering	468,33 Ha	58,40 %
3.	Luas tanah basah	27,00 Ha	3,36 %
4.	Luas tanah perkebunan	0,00 Ha	0 %
5.	Luas fasilitas umum	68,18 Ha	8,50 %
6.	Luas tanah hutan	73,50 Ha	9,16 %
	Total luas	802,00 Ha	100 %

Sumber Data: profil desa Kerten Tahun 2022

Melalui table 2.1 diketahui total luas wilayah Desa Kerten 802,00 Ha, wilayah yang paling luas adalah wilayah wilayah tanah kering dengan luas 468,33 Ha, tanah kering maksudnya kondisi tanah yang tidak mendapat genangan air pada rentan waktu tertentu dalam dua belas bulan. Tanah kering banyak digunakan untuk lahan pertanian tembakau. Dibandingkan dengan luas tanah basah sangatlah jauh, yaitu hanya 27,00 Ha. Tanah basah artinya adalah kondisi lahan dengan kandungan air permanen dan wilayah tanah basah inilah

yang dijadikan lahan pertanian tetap yang mana proses bercocok tanam tanpa henti karena tidak adanya ketergantungan dengan cuaca atau musim penghujan.

Tabel 2. 2 Batas Wilayah Desa Kerten

Batas	Desa/Kelurahan/Kecamatan
Sebalah Timur	Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno
Sebelah Barat	Desa Katekan, Kecamatan Gantiwarno
Sebelah Selatan	Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, DIY
Sebelah Utara	Desa Sawit, Kecamatan Gantiwarno

Sumber Data: profil desa Kerten Tahun 2022

Melalui tabel 2.2 dikenali Desa Kerten berbatasan dengan 3 Desa yang berada dalam Kecamatan Gantiwarno, dan terdapat 1 Desa dari Kecamatan Prambanan, yaitu Desa Gayamharjo. Sehingga dapat dikatakan Desa Kerten adalah desa yang terletak dipinggir Kecamatan.

Tabel 2. 3 Kondisi Orbitasi Desa Kerten

Jarak Dari Pusat Pemerintah Kecamatan	5 Km
Jarak Dari Pusat Pemerintah Kota	15 Km
Jarak Dari IbuKota Kabupaten	15 Km
Jarak Dari IbuKota Provinsi	120 Km

Sumber Data: profil desa Kerten Tahun 2022

Melalui tabel di atas dapat diketahui letak Desa Kerten jauh dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak 120 Km dan membutuhkan waktu sangat lama. Namun dengan hal ini kondisi jalan di Desa Kerten menuju Ibu Kota Provinsi sudah memadai atau sudah baik. Dari Ibu Kota kecamatan hanya dengan menempuh jarak 5 Km saja, sedangkan jarak dari Ibu Kota Kabupaten hanya berjarak 15 Km dan tidak membutuhkan waktu lama, serta dengan kondisi jalan yang sudah baik.

C. Kondisi Demografis

Secara keseluruhan, ada 2.044 orang yang tinggal di Desa Kerten, dengan 1.012 pria serta 1.032 wanita. Terdapat 740 rumah di komunitas ini. Berikut adalah rinciannya:

1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

Total masyarakat yang ada di lingkungan desa disajikan dalam table 2.4.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1012	1032	2044

Sumber Data: profil desa Kerten Tahun 2022

Melalui table 2.4 diketahui total penduduk sebanyak 2.044 Jiwa. Berdasarkan golongan jumlah diatas didominasi atau lebih banyak perempuan dengan jumlah 1032 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 1012 jiwa.

2. Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama

Kepercayaan penduduk desa ditampilkan secara detail dijelaskan pada Table 2.5.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Agama

No.	Agama	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	Islam	879	897	1776
2.	Kristen	4	3	7
3.	Katholik	127	132	259
4.	Hindu	1	0	1
5.	Buddha	1	0	1
6	Khonghucu	0	0	0
Total		1012	1032	2044

Sumber Data: profil desa Kerten Tahun 2022

Melalui table 2.5 diketahui penduduk Desa Kerten mayoritas beragama Islam yang mencapai 1.776 Jiwa, dan ada yang beragama Hindu dan Buddha masing-masing hanya berjumlah 1 Orang saja. Namun walaupun penduduk Desa Kerten mayoritas beragama Islam, toleransi beragama di Desa Kerten sangat terjaga dalam kehidupan bersosial, dikarekan belum pernah terjadi konflik antar umat beragama.

3. Jumlah Penduduk menurut Golongan Pendidikan

SDM memiliki kaitan dengan pendidikan dan proses pembangunan serta pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik jika terdapat cukup banyak tenaga pendidik dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi di masyarakat. Demikian pula dengan akses pendidikan di Desa Kerten, akses pendidikan menjadi terjangkau, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sangat dekat dengan pemukiman masyarakat di desa tersebut. Namun terdapat informasi bahwa masyarakat masih mendapatkan pendidikan yang kurang, karena berdampak pada pembangunan dan perkembangan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang ada di Desa Kerten dapat diketahui berikut ini:

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	150	161	311
2.	Belum tamat SD/ sederajat	103	123	226
3.	Tamat SD/ sederajat	234	264	498
4.	SLTP/ sederajat	139	118	257
5.	SLTA/ sederajat	326	297	623
6.	Diploma I/II	6	9	15

7.	Diploma III/sarjana	20	22	42
8.	Diploma IV/Strata I	34	36	70
9.	Strata II	0	2	2
10.	Strata III	0	0	0
Total		1012	1032	2044

Sumber data: profil desa Kerten Tahun 2022

Tabel 2.6 menampilkan pendidikan masyarakat didominasi pendidikan SLTA/ sederajat yang mencapai 623 Orang, selanjutnya disusul oleh jumlah tertinggi kedua yaitu Tamat SD/ sederajat yang mencapai 498 Orang dan tingkat pendidikan terendah yaitu Strata II yang berjumlah 2 Orang. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan yang sampai dengan Strata III belum ada. Berdasarkan data di atas mampu disimpulkan bahwa pendidikan terbilang cukup rendah karena dilihat dari rendahnya jumlah lulusan Sarjana yang ada di Desa Kerten.

4. Jumlah Penduduk Masyarakat Tani

Pertanian menjadi pekerjaan dominan masyarakat, didukung dengan kesuburan tanah yang dimiliki. Hal ini dikarenakan bahwa sektor pertanian yang ada di Desa Kerten memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, detail dari profesi masyarakat dapat dikenali berikut:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Masyarakat Tani

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	87	16	103

Sumber Data: profil desa Kerten Tahun 2022

Melalui table 2.7 diketahui dominasi masyarakat petani yakni pria, disusul dengan wanita pada urutan setelahnya.

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Pertanian menjadi profesi utama masyarakat setempat. Menurut perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten, hal ini sering kali sulit untuk dilakukan karena mereka tidak memiliki cukup kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Ketika sebuah desa berkembang dan meningkatkan fasilitas dan permodalannya, terutama di sektor produktif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Karena tingkat kemiskinan di Desa Kerten selalu tinggi, masyarakat terdorong untuk mencari pilihan lain yang dapat membantu mereka dalam memperbaiki kondisi ekonominya. Banyak kegiatan Organisasi Masyarakat di Desa digunakan sebagai asset informasi guna membangun masyarakat desa.

Dari apa yang telah disampaikan, Desa Kerten masih dianggap sebagai desa di Kabupaten Klaten yang belum bisa memandikan dirinya sendiri. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa Desa Kerten membutuhkan bantuan yang berlandaskan pada undang-undang tentang pembangunan perekonomian penduduk agar berkembang. Hal ini jelas karena mayoritas masyarakat berprofesi petani yang masih mengerjakan lahannya dengan tangan. Hal ini berdampak buruk bagi perekonomian Desa Kerten, sehingga sangat masuk akal jika hal tersebut merugikan masyarakat. Data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kerten memiliki sumber kekuatan dalam membangun hubungan yang damai di dalam masyarakat.

Mereka melakukan hal ini dengan menekankan pada nilai-nilai luhur setempat. Masyarakat yang tinggal di Desa Kerten masih menjunjung tinggi nilai luhur serta aturan guna pemerataan sosial dalam masyarakat. Kendati demikian kesehatan dan kesejahteraan masyarakat-lah yang menjadi pilihan utama agar dapat berjalannya sebuah desa yang mandiri dan desa adat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai religius dan luhur bangsa.

E. Sarana dan Prasarana

Kegiatan untuk membangun masyarakat membutuhkan kemandirian serta persiapan, Desa Kaerten memiliki fasilitas diantaranya:

Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana di Desa Kerten

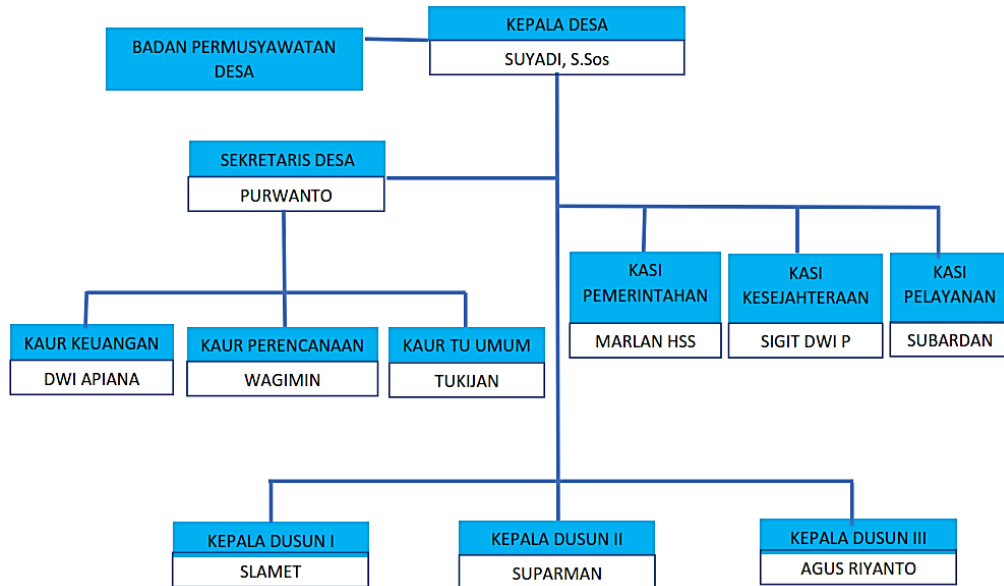
No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Posyandu	6 unit
2.	Polindes	1 unit
3.	TK	1 unit
4.	SD/MI	2 unit
5.	TPA/TPQ	2 unit
6.	Tempat Ibadah	22 unit
7.	Lapangan Olahraga	1 buah
8.	Jalan	10.800
9.	Jembatan	12 unit

Sumber Data: Profil Desa Kerten Tahun 2022

Melalui table 2.8 dikenali fasilitas sarana dan prasana di Desa Kerten terbilang baik. Namun jika dilihat dari segi pendidikan yang ada, Desa Kerten belum mempunyai gedung SMP dan SMA yang dapat membantu berjalannya pendidikan secara efektif, hal ini dapat berpengaruh dalam peningkatan kapasitas SDM yang baik.

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kerten

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kerten



Sumber Data: profil desa Kerten Tahun 2022

Melalui bagan 2.1 diketahui bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Kerten dapat disimpulkan bahwa, sistem pemerintahan tersusun atas BPD dan pemerintah desa. Sekretaris desa adalah bagian dari administrasi yang bertugas menjalankan dan mengkoordinasikan urusan desa. Sekretaris desa ialah pejabat dengan tanggung jawab atas urusan umum dan kesejahteraan desa. Kaur keuangan, umum, dan perencanaan juga memainkan peran penting untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan efisien.

Kepala desa bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintah desa. Kades menjalankan sistem berdasarkan putusan BPD. Setelah keputusan bersama, kepala desa mengirimkan laporan pelaksanaan ke tingkat pemerintahan berikutnya, yaitu Bupati, yang memberikan tanggung jawab

kepada BPD. Kepala desa kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada masyarakat agar desa menjadi lebih terbuka.

G. Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Kerten

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin sistem pemerintah desa dan bertanggung jawab atas operasionalnya. Memikul tanggung jawab menyelenggarakan sistem, menjalankan serta mendorong perkembangan masyarakat. Tugas pokok dan fungsinya diantara:

- a. Organisasi pemerintah desa, termasuk tata kelola pemerintahan, menetapkan aturan untuk masyarakat, mempromosikan masalah pertanahan, mempromosikan perdamaian dan ketertiban, bekerja untuk menjaga lingkungan, manajemen kependudukan, dan mengidentifikasi dan mengelola wilayah.
- b. Mengembangkan infrastruktur pedesaan dan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya.
- c. Menjalin kemitraan dengan universitas lain dan organisasi masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Guna rangka mengakomodasi serta memberikan gagasan membangun, menyetujui Rencana Peraturan Desa (Perdes) bersama kades, serta memantau hasil kerja kades.

3. Sekretaris/Carik

Pejabat desa yang mendukung kades dalam merencanakan serta menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, serta menyiapkan

dokumentasi pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, perangkat desa juga bertugas menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut ini adalah daftar tanggung jawab sekretaris desa:

- a. mengkoordinasikan tugas-tugas administratif dan mengumpulkan sumber daya untuk memastikan tanggung jawab kepala desa berjalan dengan baik;
- b. Berkontribusi dalam pembuatan peraturan desa;
- c. membuat dokumentasi yang diperlukan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. mengkoordinasikan penjadwalan pertemuan rutin;
- e. Kepala desa diberi tugas tambahan.

4. Kaur Keuangan

Pejabat pemerintahan yang mendukung sekretaris desa dalam menjalankan keuangan pada administrative desa. Terdapat juga tanggung jawab diantaranya:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
- b. Mengelola serta merumuskan Penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran Desa pada APBDes.
- c. Mengurus uang
- d. Mengelola administratif, pemeriksaan pengelolaan keuangan serta pengelolaan gaji pejabat desa.

5. Kaur Umum dan Perencanaan

Pejabat yang bertanggung jawab terkait rancangan desa. Sesuai dengan bidang tugasnya, Kaur Perencanaan melaksanakan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan struktur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD).

Tugas sekretaris desa antara lain mendukung Kaur Perencanaan terkait hal pelayanan administrasi perencanaan desa. Kepala Urusan Perencanaan Desa juga bertanggung jawab atas fungsi-fungsi berikut sebagai tambahan:

- a. melaksanakan tugas-tugas yang memiliki dampak keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan sasaran masing-masing;
- c. mengatur operasional sesuai dengan tugas masing-masing;
- d. Menjalin kontrak dengan distributor dalam penyediaan sarana dan prasarana serta melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan

Tanggung jawab kaur perencanaan adalah mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, seperti:

- a. Mengembangkan rencana keuangan untuk komunitas;
- b. Mengumpulkan informasi tentang pertumbuhan daerah melalui survei;
- c. Memantau;
- d. Mengevaluasi program;
- e. Mempersiapkan laporan.

6. Kasi Kesejahteraan

Pejabat dengan tugas operasional. Kasi kesejahteraan memiliki fungsi:

- a. Membangun infrastruktur pedesaan,
- b. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan, bersosialisasi dengan masyarakat, serta
- c. Menginspirasi masyarakat dalam hal kemasyarakatan dan kepemudaan.

7. Kasi pemerintahan

Individu yang bertanggung jawab atas bagian pemerintahan bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat desa dan memberikan bantuan kepada kepala desa dalam pelaksanaan tanggung jawab teknis yang terkait dengan administrasi desa. Yang termasuk dalam daftar tanggung jawab kepala seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. pengelolaan tata kelola pemerintahan;
- b. penyusunan usulan peraturan desa;
- c. kesulitan dalam pengembangan lahan;
- d. membina ketentraman dan ketertiban;
- e. kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- f. profil desa dikelola dan dikumpulkan dengan menggunakan data.

8. Kasi Pelayanan

Pejabat yang mendokumentasikan APBDes, DPA, DPAL. Menjalankan tanggung jawab tersebut, pejabat juga berkewajiban:

- a. Kegiatan penyuluhan dan motivasi harus dilakukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat.

- b. Melakukan lebih banyak upaya untuk terlibat dalam kegiatan swadaya dan gotong royong di daerah pedesaan.
- c. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan.
- d. Kegiatan keagamaan di seluruh desa diarahkan dan dilaksanakan.
- e. Mengembangkan tenaga kerja lokal melalui pembinaan.

9. Kepala Dusun

Pejabat yang menjalankan serta mengarahkan sistem dalam wilayah administrative, dengan tanggung jawab diantaranya:

- a. Migrasi penduduk, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, membela masyarakat, serta mengatur dan mengelola wilayah adalah contoh-contoh manajemen teritorial.
- b. Membantu Kasi dan Kaur dalam menyusun kegiatan anggaran (KKA) dengan mengidentifikasi jenis dan kategori tugas yang harus mereka kerjakan bersamaan dengan pengadaan barang dan jasa.
- c. memutuskan bagaimana pembangunan dilakukan di dalam wilayahnya.
- d. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian lingkungan, melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat.
- e. Berusaha mengikutsertakan lingkungan dalam membantu pemerintah dan pembangunan agar dapat berfungsi dengan baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil analisis terkait upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Bina Melati di Desa Kraguman, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Makmur widodo dan Bayem Panguripan di Desa Kerten dilakukan melalui pemberian pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan;
2. Strategi Pemerintah Desa dalam pemberian pemungkinan kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dilakukan dengan cara sosialisasi yang bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat tentang potensi desa dan potensi diri. Pemerintah Desa Kerten juga memfasilitasi berbagai kegiatan Kelompok Tani Makmur widodo dan Bayem Panguripan seperti pelatihan pembuat pupuk dari kotoran hewan dan studi banding ke daerah Kulon Progo dan Temanggung tentang pengolahan tanaman tembakau;
3. Strategi Pemerintah Desa dalam penguatan Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan akses kepada masyarakat untuk mengorganisasikan diri dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk mendapatkan bantuan mesin pertanian seperti alat perontok padi, handtraktor, mesin pengolah pupuk

dari kotoran hewan kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dan memberikan akses kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan untuk memanfaatkan tanah kas desa di sekitar kantor atau balai desa;

4. Strategi Pemerintah Desa dalam perlindungan Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dilakukan dengan cara mendukung kegiatan seperti pembuat pupuk oleh Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan;
5. Strategi Pemerintah Desa dalam penyokongan Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dilakukan dengan cara memberikan sokongan moril dan materil. Sokongan moril berupa pemberian motivasi kepada anggota Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan agar tetap berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan pertanian di Desa Kerten. Sedangkan sokongan materil berupa alat-alat pertanian seperti alat pengering padi, alat perontok padi, dan handtraktor kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan;
6. Strategi Pemerintah Desa dalam pemeliharaan Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dilakukan dengan cara membangun dialog atau diskusi dengan Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan.
7. Ada dua kendala yang dihadapi oleh Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan di Desa Kerten yaitu kesulitan untuk mendapat air saat

musim kemarau dikarekan tidak adanya saluran irigasi dan kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi;

8. Untuk mencari jalan keluar dari persoalannya, Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan menggelar rapat rutin sekali sebulan dan menggelar konsultasi dengan Pemerintah Desa Kerten; dan
9. Karena curah hujan yang tinggi hasil panen tanaman padi hanya dikonsumsi sendiri dan belum bisa didistribusikan ke pengepul-pengepul, sedangkan untuk tanaman tembakau masyarakat tani Desa Kerten belum berani menanam, takutnya akan terjadi gagal panen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran:

1. Pemerintah Desa Kerten diharapkan untuk terus memberikan pemungkinan kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan yaitu dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka menyadari segala potensi yang ada di Desa Kerten dan segala potensi yang ada di dalam diri mereka serta terus memfasilitasi kegiatan Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan baik berupa pelatihan pembuatan pupuk maupun studi banding ke daerah Kulon Progo dan Temanggung berkaitan dengan pengelolaan tanaman tembakau;
2. Pemerintah Desa Kerten diharapkan untuk terus memberikan penguatan kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan yaitu dengan terus memberikan akses kepada Kelompok Tani Makmur Widodo

dan Bayem Panguripan untuk mengorganisasikan diri dan memberikan akses kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan untuk memanfaatkan lahan kosong sehingga masyarakat bisa terlibat dalam agenda pembangunan desa;

3. Pemerintah Desa Kerten diharapkan terus memberikan perlindungan kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan yaitu dengan mendukung secara penuh seluruh agenda dan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan;
4. Pemerintah Desa Kerten diharapkan untuk terus memberikan penyokongan kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dengan memberikan motivasi sehingga Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan tetap bersemangat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa;
5. Pemerintah Desa Kerten diharapkan untuk terus memberikan pemeliharaan kepada Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dengan terus melakukan dialog dan diskusi sehingga Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan dapat menemukan solusi atas segala persoalan yang ada;
6. Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan hendaknya terus meningkatkan diskusi baik dalam internal kelompok maupun dengan Pemerintah Desa Kerten sehingga kendala yang mereka hadapi dapat menemukan jalan keluar;

7. Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan hendaknya terus bekerja tanpa pamrih dalam bertani dan bercocok tanam untuk memenuhi kepentingan kelompok dan masyarakat Desa Kerten; dan
8. Pemerintah Desa Kerten dan Kelompok Tani Makmur Widodo dan Bayem Panguripan hendaknya terus memberi penyadaran dan motivasi kepada masyarakat di Desa Kerten sehingga pada gilirannya masyarakat terus berminat untuk mengorganisasikan dirinya dalam Kelompok Tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013) *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi Strategi, Konsep Desa Pusat pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anonim. 2009. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. <http://www.jurnalsdm.blogspot.com> (diakses 05 Desember 2022 pukul 13:45 WIB).
- B. N. Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko, Sutoro. dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Eko, Sutoro. dkk. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Karbulah, K., & Aliyudin, A. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani*. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 90-113
- Liwu, Adrianus Sodi, and Cahyo Sasmito. "Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8.4 (2019): 228-233.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Agus. "Studi Partisipasi Masyarakat pada Program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul." *Universitas Diponegoro, Semarang* (2008).
- Nippi, Andi Tenri. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani." *Meraja journal* 2.1 (2019).

- Putra, C. K. (2013). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Ramdhana, F., Usman, J., & Mone, A. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Kampung Sabbeta Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(5), 1578-1594.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Rosdakarya.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thopilus, Aisnak. "Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Di Desa Banjarejo Tunjungsari Gunung Kidul, Propinsi DIY." (2018).
- Wrihatnolo & Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Wurangian, Mikhael. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Politik* 7.2 (2018): 1-12.

Sumber lain

- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/Pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Desa dan Pengurus atau Pengelola Kelompok Tani:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi anggota kelompok dapat berkembang.
 - a. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat?
 - b. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan yang diberikan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki?
 - c. Jika ada, pelatihan seperti apa yang dilakukan? Siapa pelaku pelatihannya?
 - d. Situasi seperti apa yang mampu mendukung kemauan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada pada anggota kelompok?
2. Penguatan pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhan.

- a. Apakah kegiatan yang ada di kelompok tani mampu membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka?
 - b. Apa alasan utama yang melatarbelakangi berdirinya Kelompok Tani ini?
 - c. Apa prinsip utama Kelompok Tani ini?
 - d. Apa yang menjadi tujuan utama berdirinya Kelompok Tani ini?
 - e. Apa kendala yang sering dihadapi dalam proses pengembangan Kelompok Tani ini?
 - f. Bagaimana perkembangan Kelompok Tani dari tahun ke tahun? Apakah mengalami kemajuan atau kemunduran?
3. Melindungi Kelompok Tani dari persaingan yang tidak seimbang dengan kelompok tani lain.
 - a. Bagaimana mengatasi persaingan yang tidak seimbang dengan kelompok tani lainnya?
 - b. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani?
 - c. Apa saja produksi yang dihasilkan oleh kelompok tani?
 - d. Bagaimana meyakinkan konsumen tentang kualitas hasil panen atau hasil produksi yang dihasilkan kelompok tani ini dibandingkan kelompok tani lainnya?
 - e. Usaha apa yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan hasil panen?
 - f. Bagaimana pemasaran hasil panen sampai saat ini?
 4. Pemberian dukungan kepada anggota kelompok agar dapat menjalankan peran dan fungsi kehidupannya.

- a. Bentuk dukungan atau pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan kelompok tani ini?
- b. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan potensi masyarakat di Desa Kerten?
- c. Motivasi seperti apa yang dilakukan kelompok agar bapak/ibu di Desa Kerten terus mengembangkan potensi yang mereka miliki?
- d. Seberapa besar manfaat bantuan pemerintah bagi perkembangan kelompok?
- e. Bagaimana pengelolaan kelompok tani ini?

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/Pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Para Anggota Kelompok Tani:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan anggota Kelompok Tani dapat berkembang.
 - a. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga bapak/ibu tertarik untuk bergabung dalam kelompok tani ini?
 - b. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kelompok tani ini?
 - c. Jika ada, pelatihan seperti apa yang dilakukan bagi kelompok tani ini? Siapa pelaku pelatihannya?
 - d. Apa yang menjadi motivasi bapak/ibu sehingga bergabung di dalam kelompok tani ini?

- e. Dari mana bakat yang bapak/ibu miliki dalam bercocok tanam, apakah merupakan bakat turunan atau melalui suatu proses belajar atau pelatihan?
2. Penguatan pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhannya.
 - a. Berapa pendapatan yang bapak/ibu peroleh dari hasil bertani?
 - b. Apakah kegiatan dalam kelompok tani ini menjadikan bapak/ibu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain?
 - c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan kelompok tani?
 - d. Bagaimana para anggota membantu mengatasi berbagai macam kendala yang sering muncul dalam pengembangan kelompok?
 - e. Apakah pendapatan yang diperoleh dari setiap hasil panen mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari?
 3. Pemberian dukungan kepada anggota kelompok agar dapat menjalankan peran dan fungsi kehidupannya.
 - a. Bagaimana bapak/ibu membagi waktu bapak/ibu sebagai seorang petani dengan pekerjaan lainnya?
 - b. Sejauh ini, apa saja yang bapak/ibu ketahui tentang upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan Kelompok Tani ini?
 4. Memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antaranggota kelompok.
 - a. Bagaimana upaya yang dilakukan agar anggota kelompok mempunyai rasa saling memiliki di dalam kelompok?

- b. Bagaimana respon bapak/ibu setelah bergabung bersama Kelompok Tani ini?
 - c. Apakah ada kegiatan lain yang dilakukan kelompok untuk terus memelihara tali persaudaraan antaranggota kelompok?
 - d. Apa kontribusi Kelompok Tani terhadap kehidupan masyarakat setempat?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani ini dan bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/Pukul :

Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat Desa Kerten

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi anggota kelompok dapat berkembang.
 - a. Apa saja potensi yang ada di Desa Kerten?
 - b. Apakah sejauh ini masyarakat terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok tani?
 - c. Sejauh yang anda tahu, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menyadarkan masyarakat setempat terkait potensi yang dimilikinya?
 - d. Apakah ada sosialisasi atau pelatihan yang diberikan kepada bapak/ibu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki?
 - e. Jika ada, pelatihan seperti apa yang dilakukan? Siapa pelaku pelatihannya?

- f. Situasi seperti apa yang mampu mendukung kemauan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada pada anggota kelompok tani?
2. Penguatan pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhan.
 - a. Manfaat apa saja yang anda dapatkan dari kegiatan kelompok tani?
 - b. Apakah kegiatan yang ada di kelompok tani mampu membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka?
 - c. Sejauh yang anda tahu, apa yang menjadi tujuan utama berdirinya kelompok tani ini?
 - d. Bagaimana sistem perekrutan anggota kelompok tani di Desa Kerten?
3. Pemberian dukungan kepada anggota kelompok agar dapat menjalankan peran dan fungsi kehidupannya.
 - a. Bentuk dukungan atau pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan kelompok tani ini?
 - b. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan potensi masyarakat di Desa Kerten?
 - c. Motivasi seperti apa yang diberikan oleh kelompok agar bapak/ibu di Desa Kerten terus mengembangkan potensi yang mereka miliki?
4. Kendala apa saja yang anda ketahui dalam perkembangan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani ini dan bagaimana mengatasi kendala yang sering muncul dalam kelompok tani tersebut.

Kelompok Tani Bayem Panguripan dan Makmur Widodo

1. Bayem Panguripan

Anggota Kelompok Tani Bayem Panguripan

No.	Nama	Jabatan
1	Muji Pamungkas	ketua
2	Hr. Sumadi S.Pd	Sekretaris
3	Sumbono	Bendahara
4	Warsito	Anggota
5	Cipto Sumarto	Anggota
6	Tukijan	Anggota
7	Suratno	Anggota
8	Sulanto	Anggota
9	Wismo	Anggota
10	Hadi Satiman	Anggota
11	Suman	Anggota
12	Karjlo	Anggota
13	Slamet	Anggota
14	Dwi	Anggota
15	Sumbono	Anggota
16	Surono	Anggota
17	Wiyono	Anggota
18	Wiji Hartono	Anggota
19	Budianto	Anggota
20	Surojo	Anggota
21	Johan	Anggota
22	Wagimin	Anggota
23	Soni	Anggota
24	Parno	Anggota
25	Surani	Anggota

26	Yono	Anggota
27	Sumadi	Anggota
28	Widodo	Anggota
29	Hartono	Anggota
30	Purwanto	Anggota
31	Marsono	Anggota
32	Gatot Surjono	Anggota
33	Mitro Sugio	Anggota
34	Pujiono	Anggota
35	triayanto	Anggota

2. Kelompok Tani Makmur Widodo

Anggota Kelompok Tani Makmur Widodo

No.	Nama	Jabatan
1.	Warso	Ketua
2.	Ngaliman	Sekretaris
3.	Gunardi	Bendahara
4.	Tulus Raharjo	Anggota
5.	Jasman	Anggota
6.	Y Rismiyati	Anggota
7.	Karno Suwito	Anggota
8.	Wagino	Anggota
9.	Manto Sriyono	Anggota
10.	Tukiyem	Anggota
11.	Sarta	Anggota
12.	Suwardi	Anggota
13.	Manto Wiyono	Anggota
14.	Wahyu	Anggota
15.	Suwasih	Anggota

16.	Sutopo, S.Pd	Anggota
17.	Tukijo	Anggota
18.	Subandi	Anggota
19.	Wagiman	Anggota
20.	Nardi Suwito	Anggota
21.	Suprihono	Anggota
22.	Widi Suwito	Anggota
23.	Jamul	Anggota
24.	Hartono	Anggota
25.	Ny. Sastromiharjo	Anggota
26.	Yatno Suwarso	Anggota
27.	Danang	Anggota
28.	Sumekto	Anggota
29.	Jemali	Anggota
30.	Sukisniwati	Anggota
31.	Supartini	Anggota
32.	Sundan	Anggota
33.	Setyo Raharjulusmin	Anggota
34.	Untung Sutikno	Anggota
35.	Marlan Harun Sahid	Anggota
36.	Ngaliman	Anggota
37.	Marto Suwarno	Anggota
38.	Martiasih	Anggota
39.	Margono	Anggota
40.	Gunardi	Anggota
41.	Sukinem	Anggota
42.	Juminem	Anggota
43.	Kaminto	Anggota
44.	Ny. Sarito Narto Raharjo	Anggota
45.	Sutinem Pairo Tioso	Anggota

46.	Ny. Sihno Diharjo	Anggota
47.	Sugeng Widodo	Anggota
48.	Rubiyem	Anggota
49.	Samiyun	Anggota
50.	Mardi Santoso	Anggota
51.	Suprih	Anggota
52.	Noto Suwarno	Anggota
53.	Sri Suhartini	Anggota
54.	Sahid	Anggota
55.	Giyatno	Anggota
56.	Parwono	Anggota
57.	F. Mulyadi	Anggota
58.	Y Slamet	Anggota
59.	Sukarsiyem	Anggota
60.	Sena	Anggota
61.	Ig Sunardi	Anggota
62.	Samino	Anggota
63.	Suwarso	Anggota
64.	Wiwik Sukeksi	Anggota
65.	Sujono	Anggota
66.	Yd Sandiyanto	Anggota
67.	Slamet	Anggota
68.	Sunarti	Anggota

DOKUMENTASI



(Foto: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kerten)



(Foto: serah terima surat tugas penelitian dengan Kepala Desa Kerten Bapak Suyadi S. Sos)



(Foto: wawancara dengan anggota Kelompok Tani Bayem Panguripan Bapak Warsito)



(Foto: wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Bayem Panguripan Bapak Muji Pamungkas)



(Foto: wawancara dengan Anggota Kelompok Tani Bayem Panguripan Bapak Dwi)



(Foto: wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Agus)



(Foto: Peta Wilayah Desa Kerten)



(Foto: wawancara dengan Bendara Kelompok Tani Bayem Pangurpan Bapak Sumbono)



(Foto: wawancara dengan Bendahara Kelompok Tani Makmur Widodo Bapak Gunardi)



(Foto: wawancara dengan Anggota Kelompok Tani Makmur Widodo Ibu Sutarni)



(Foto: Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suyadi S. Sos)



(Foto: Handtraktor alat pertanian)



(Foto: alat perontok Padi)



(Foto: wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Makmur Widodo Bapak Warso)



(Foto: wawancara dengan Anggota Kelompok Tani Makmur Widodo Mas Danang)